

# MODEL-MODEL PSIKOLOGI KEBHINNEKATUNG GALIKAAN DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Oleh  
**Faturochman**  
Fakultas Psikologi UGM

## Abstrak

Persatuan Indonesia secara politis sudah didefinisikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan salah satu sila dasar negara tetapi secara psikologis masih belum jelas. Dari perspektif psikologi sosial, dapat dikembangkan beberapa model persatuan dalam kebhinnekaan. Pertama adalah dekategoriisasi dan personalisasi. Maksudnya, dari berbagai suku, golongan serta kelompok yang mengalami salinasi kategori atau identitas kelompok sangat kuat, dilakukan upaya agar identitas kelompok hilang. Model kedua adalah rekategoriisasi, yaitu melebur kategori “kami” dan “mereka” menjadi “kita”. Sepintas upaya rekategoriisasi untuk membentuk identitas Indonesia merupakan upaya ideal. Kenyataan menunjukkan bahwa upaya ini tidak berhasil. Model ketiga yaitu model diferensiasi mutual. Model ini mengakui adanya perbedaan-perbedaan tetapi mereka memiliki peran-peran yang komplementer yang akan mendukung keberhasilan tujuan umum. Model selanjutnya disebut model hibrida. Model ini mengakui bahwa individu pada umumnya memiliki lebih dari satu identitas. Orang dengan identitas seperti ini bisa saja memperlakukan identitas dirinya secara hirarkhis atau memiliki persilangan kategori. Di era global seperti sekarang ini tampaknya model hibrida ini akan lebih berkembang sekaligus dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak tanpa perlu penyeragaman. Untuk mengikat model hibrida dalam persatuan bangsa masih diperlukan pengembangan aspek psikologis lain, di antaranya adalah penghormatan, kepercayaan, keadilan, kebijaksanaan, dan pemaafan atas kesalahan pihak lain.

Kata kunci: psikologi kebhinnekatunggalikaan, dekategoriisasi, rekategoriisasi, diferensiasi mutual, multi identitas, persilangan kategori.

## 1. Pendahuluan

Konflik dan kecarutmarutan sosial yang berkembang di negeri ini dapat mengancam konsensus yang telah diikrarkan dan masih diakui: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Permasalahan yang berkembang juga mencabik dasar-dasar kehidupan bersama yang diagungkan: kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan. Kenyataan ini menunjukkan kepicikan kita dalam mengelola hidup bersama. Indonesia yang memiliki ragam dan kekayaan budaya yang sangat banyak seharusnya dapat mengembangkan kearifan yang tinggi. Indonesia yang juga memiliki sumberdaya melimpah seharusnya

tidak menjadi negara yang masuk dalam kategori miskin, tidak aman, korup, melanggar HAM dan memiliki ketidakpastian hukum tinggi, serta ‘perlu dihindari’. Begitu banyak hal negatif yang muncul di negeri ini sehingga tokoh nasional Sja’fii Maarif menyimpulkan bahwa kerusakan di negeri ini nyaris sempurna (lihat Effendi dkk., 2003). Karenanya, tidaklah salah bila ada orang yang apatis, tidak lagi ingin mendengar dan melihat apa yang sedang terjadi. Pada sisi lain, banyak pula orang masih menikmatinya, menunggu-nunggu munculnya kejelekan lainnya, siap terlibat dalam perkara kejelekan itu, atau menjadi pengobarnya. Ada juga yang optimis dengan keadaan bangsa ini setelah melakukan analisis secara faktual dan rasional (Boediono, 2007). Para pihak itu merasa benar dengan posisinya.

Ketika negeri ini belum bisa lepas dari berbagai masalah kebangsaan, tantangan dan ancaman lain datang dengan sangat deras, yaitu bencana alam datang bertubi-tubi. Pada sisi lain era pasar bebas sudah dimulai dan akan terus membesar serta menyeret Indonesia dengan berbagai ideologi dan kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan negeri ini. Ada kekuatan yang mengarah dan berupaya untuk melindas kehidupan yang selama ini ada dan dengan tertatih-tatih dibangun di negeri ini bila tidak ada upaya yang cerdas dan bijak menghadapinya. Upaya ini adalah sinergi dari berbagai potensi yang ada, khususnya keragaman sosial dan budaya, di samping sumber daya alam yang masih tersisa.

Pertanyaannya, masih didominasi kelompok orang yang sungguh-sungguh dan tulus menghendaki situasi negeri ini membaik? Pertanyaan ini muncul karena mencari kriteria sungguh-sungguh dan tulus itu ternyata sulit. Hampir setiap orang menyatakan ingin berbuat baik, namun fakta menunjukkan sebaliknya. Saat ini, kebaikan sudah sulit dipisahkan dengan kejelekan, kebaikan didefinisikan berbeda pada level yang berbeda-beda dan tidak konsisten antara level yang satu dengan yang lainnya. Karenanya, definisi kebaikan menjadi tidak mudah dirumuskan. Salah satu cara untuk memahami dan merumuskannya adalah dengan melihat pada keragaman kebaikan yang ada pada berbagai kelompok masyarakat. Selanjutnya, perlu dikenali dan dipraktikkan format yang bijak dalam manajemen kebaikan yang beragam itu.

## **2. Psikologi Bhinneka Tunggal Ika**

Kebhinekaan adalah kodrat. Pada sisi lain, penerimaan dan penilaian terhadap kebhinekaan merupakan konstruksi sosial psikologis. Secara sederhana pola penerimaan dan upaya pengelolaan akan kebhinekaan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu inklusi dan eksklusif. Dua pola itu sudah ada, memiliki sejarah perkembangan yang panjang, dan akan terus berlanjut. Pada pola inklusi, penerimaan dan pengelolaan kebhinekaan tampak menjadi sederhana karena menerima perbedaan menjadi bagian dari nilai-nilai dasar yang dioperasionalkan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Sementara itu, eksklusivitas berarti membatasi diri agar pihak-pihak yang berbeda tidak masuk dalam lingkungannya. Dengan kata lain, kesamaan menjadi dasar penerimaan dan pengelolaan relasi yang eksklusif dan pada waktu yang bersamaan perbedaan menjadi dasar untuk penolakan.

Salah satu hal yang menarik adalah perubahan pada tingkat kelompok, komunitas atau masyarakat dari satu pola ke pola lainnya. Hal lain yang tidak kalah menariknya adalah ketidakkonsistenan dan ketidakseragaman pola yang dianut pada level yang berbeda. Maksudnya, seseorang bisa saja masuk dalam suatu kelompok inklusif tetapi pada waktu yang bersamaan dia juga menjadi anggota kelompok yang lain lagi yang polanya eksklusif. Dilihat dari sisi individu, mobilitasnya memang lebih besar. Dari sisi kelompok, persoalannya adalah permeabilitas yang rendah. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu dan merupakan himpunan dari berbagai potensi. Artinya, aneka potensi bersinergi. Untuk mencapai sinergi ini, pemerintah perlu mengembangkan model relasi antar kelompok (suku, agama, golongan) yang permeabel. Persoalannya, berbagai potensi yang ada dan tentunya berbeda-beda, justru sering dianggap sebagai hambatan tanpa melihat sisi positif dari pihak lain.

Salah satu asumsi yang digunakan untuk menjelaskan ketunggalikaan adalah dari sisi nondiskriminasi. Ketika hal ini terjadi maka sekat-sekatnya hilang yang berarti pula terdapat kecairan hubungan yang identik dengan kesatuan. Dalam kajian psikologi sosial, ada beberapa model kebhinnekatunggalikaan (Brewer & Gaertner, 2003; Hewstone dkk., 2002). Model yang dimaksud adalah dekategorisasi, rekategorisasi, dan perbedaan mutual. Pengembangan lebih lanjut mengarah pada model multi identitas dan persilangan kategorisasi.

## 2.1. Dekategorisasi

Ketidakselarasan relasi antara dua kelompok atau lebih dan upaya menjadikan adanya persatuan dipercaya dapat ditempuh dengan jalan dekategorisasi. Asumsinya, kategorisasi yang ada akan menguatkan perbedaan. Secara psikologis kategorisasi akan menumbuhkan *ingroup favoritism* dan *outgroup derogation*. Kedua konsep ini merupakan sumber dari bias dalam relasi antar kelompok. Dekategorisasi merupakan upaya untuk eliminasi bias *ingroup favoritism* melalui diferensiasi dan tumbuhnya personalisasi.

Setiap kelompok memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok lain. Individu sebagai anggota suatu kelompok memiliki identitas sosial sesuai dengan identitas kelompoknya. Perbedaan identitas antar kelompok menumbuhkan kategorisasi sosial. Kategorisasi sosial menumbuhkan perasaan *ingroup-outgroup* yang kuat di antara kategori-kategori atau kelompok-kelompok yang ada. Hal yang terjadi selanjutnya adalah salinasi kelompok dan deindividuasi anggota-anggotanya. Dinamika kelompok ini menjadi cara pandang terhadap kelompok lain. Karenanya terjadi bias dalam memandang *outgroup*, disebut *outgroup homogeneity bias* (Hogg dkk., 2004; Turner & Reynolds, 2003).

Dekategorisasi secara kognitif merupakan upaya untuk mengenali kembali adanya perbedaan-perbedaan (diferensiasi) individu di dalam kelompok dan personalisasi (adanya keunikan) pada setiap anggota kelompok. Secara relasional langkah-langkahnya dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan konsep dasar dari *contact hypothesis* (dari Allport, dikembangkan Pettigrew, 1998) yaitu dengan lebih mengintensifkan kontak interpersonal dari anggota-anggota kelompok yang berbeda-beda. Dengan kata lain, secara

prinsip dekategoriisasi adalah 'mengeluarkan' para anggota kelompok yang berbeda-beda menjadi individu yang berdiri sendiri.

Secara praktis, dengan mengabaikan kelompok maka personalisasi akan terwujud terutama bila suasana interaksinya setara, hangat (*intimate*), dan kooperatif. Kesetaraan status dapat dimulai dari persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga. Secara hukum setiap individu seharusnya diperlakukan sama. Intimasi merupakan salah satu kunci dari toleransi terhadap sesama yang akan mengembangkan dan memelihara relasi interpersonal. Sementara itu, kooperasi, khususnya antar kelompok, akan membuka peluang kerjasama antar individu dan mendorong terciptanya intimasi.

Model ini berhasil dikembangkan di Amerika Utara dan bahkan, antara lain, memperkuat munculnya konsep kategorisasi diri. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi diri yang kuat akan melemahkan kategorisasi kelompok (Swann dkk., 2004; Voci, 2005). Penonjolan diri ini cocok diterapkan karena negara mampu menjamin kebutuhan dasar dan menghilangkan rasa tidak aman, serta mampu menegakkan supremasi hukum. Hal ini tentu akan sulit ditemukan di negara-negara berkembang seperti Indonesia karena perbedaan situasi yang menonjol.

Ada beberapa kelemahan dari upaya dekategoriisasi dan personalisasi ini. Pertama, keduanya menafikan kecenderungan alamiah manusia sebagai makhluk sosial yang suka mengelompok. Kedua, upaya ini mengarah pada individualisasi yang dapat berlanjutnya pada individualisme. Untuk masyarakat dengan orientasi budaya kolektivisme atau ideologinya sosialisme tentu saja akan tidak mudah berubah meski ada upaya dekategoriisasi dan personalisasi. Ketiga, bila upaya ini dapat berhasil tidak ada jaminan bahwa dalam jangka waktu yang lama akan dapat bertahan. Dalam berbagai kajian (seperti Teori Identitas Sosial), kelompok memiliki keunggulan yang tidak ditemukan pada individu yang hidup sendiri, misalnya sebagai penjamin rasa aman dan pemberi kepastian. Individu yang bertahan hidup sendiri tentu akan lebih berat dibanding mereka yang hidup berkelompok sekaligus menjadi terkategoriisasikan secara sosial.

Pengalaman Indonesia di masa Orde Baru dalam memformulasikan kesatuan dan persatuan menggunakan langkah politik yang sangat tegas, total, dan tidak dapat diganggu gugat sejalan dengan model dekategoriisasi ini. Keberadaan kebudayaan yang sangat beragam menjadi dramatis karena tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk berekspresi. Lebih dari 500 suku bangsa dan lebih dari 512 bahasa cenderung diabaikan keberadaannya. Kekeliruan ini berlanjut dan mencapai puncaknya ketika politik azas tunggal dideklarasikan (Abdullah, 2006), yang berarti menafikan azas-azas lain yang merupakan ciri khas dari budaya-budaya yang ada meskipun tidak bertentangan dengan Pancasila.

## **2.2. Rekategoriisasi**

Berbeda dengan upaya dekategoriisasi, rekategoriisasi merupakan upaya untuk mentrukturisasi ulang kategorisasi kelompok pada level yang lebih tinggi secara inklusif (Brewer & Gaertner, 2003; Hewstone dkk., 2002). Dengan demikian, dua kelompok atau lebih yang masing-masing memiliki identitas yang berbeda-beda akan memiliki satu identitas kelompok yang umum. Secara teknis kelompok yang berbeda-beda tersebut

digabung. Dengan kata lain, sebutan kelompok 'kami' dan 'mereka' disintesakan menjadi 'kita' (lihat Hasan, 2004).

Penggabungan kelompok-kelompok menjadi satu dan identitasnya dileburkan sekilas tampak ideal tetapi dalam operasionalisasinya sangat kompleks. Sebelum sebuah kelompok dileburkan dengan kelompok lain tentu memiliki tujuan, karakteristik, dan homeogenitas yang berbeda-beda. Satu hal yang pasti, rekategorisasi melalui penggabungan berarti memaksakan diversitas yang besar masuk ke dalam satu kategori baru. Ada sisi positif dan negatifnya dari kondisi ini. Sisi positifnya, diversitas yang tinggi berpotensi menelorkan keputusan yang komprehensif dan kuat, serta kreativitasnya tinggi. Sisi negatifnya antara lain berpotensi memunculkan konflik internal, proses pengambilan keputusannya menjadi lambat, dan kinerjanya relatif rendah. Hasil-hasil kajian (lihat Cunningham, 2006) tidak menyarankan agar identitas sosial setiap kelompok tidak perlu dilebur atau dipaksakan dalam satu kelompok besar. Identitas kelompok yang berbeda-beda dapat dibiarkan eksis dan bersamaan dengan itu dapat diciptakan *superordinate identity* bila memang kelompok atau institusi yang lebih besar, seperti negara, dibentuk.

Praktek rekategorisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pernah dilakukan Indonesia. Di jaman Orde Baru, Pemerintahan Soeharto menggabung partai-partai politik yang ada dan menjadi kontestan Pemilu 1971 dari sepuluh partai menjadi 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah selalu menekankan bahwa kepentingan individu dan golongan tidak boleh diutamakan dan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di sini tidak hanya rekategorisasi yang terjadi, tetapi juga didahului oleh dekategorisasi. Bahkan implikasi dari kombinasi dekategorisasi dan rekategorisasi cenderung mengarah pada homogenisasi. Bentuk-bentuk lain homogenisasi banyak dilakukan di Indonesia di jaman Orde Baru. Di antaranya meliputi hal-hal kecil seperti pengecatan pagar dan atap rumah penduduk, penyeragaman institusi kemasyarakatan, penyeragaman modus pengelolaan sektor pekerjaan (model bercocok tanam, pengaturan buruh, seragam PNS), hingga model pengambilan keputusan di tingkat Pusat.

Secara psikologis, rekategorisasi yang mengarah pada homogenisasi berarti menumbuhkan depersonalisasi yang selanjutnya dapat menumbuhkan penilaian positif pada kelompoknya (Voci, 2006). Dalam konteks berbangsa, rekategorisasi memang diarahkan agar cinta kepada bangsa (rasa kebangsaan) menjadi tinggi. Namun dengan menafikan keanekaan suku bangsa, pembelajaran dari proses rekategorisasi dan depersonalisasi ini justru dapat menumbuhkan etnosentrisme di level yang lebih rendah. Karenanya tidak mengherankan bahwa kegagalan menciptakan persatuan dan kesatuan yang kaku dan total justru berujung pada upaya untuk pemisahan wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia (Abdullah, 2006). Pada tingkat yang lebih kecil (komunitas) rekategorisasi seperti itu tidak memungkinkan munculnya kreativitas, melainkan malah berbentuk perlawanan. Pada tingkat individu tekanan yang kuat dari pemerintah memunculkan apa yang disebut 'gerakan penggoblokan secara permanen' (Winarto, 2006).

Kelemahan paling dasar dari rekategorisasi adalah kurang diperhatikannya *category distinction* sebagai hal yang sulit diubah. Seorang individu bisa saja menjadi

Warga Negara Indonesia tetapi dia tidak akan bisa dengan mudahnya melepaskan atributnya sebagai orang Jawa/Cina/Batak, atau yang lain, dan kategorisasi yang lebih tinggi sebagai WNI tersebut sering tidak memuaskan kebutuhan akan kekhasan yang dimiliki seperti pada kategorisasi yang lebih rendah (misalnya, bangga memakai surjan dan bangga memiliki makanan khas yang bernama gudeg bagi orang Yogyakarta).

Rekategorisasi juga akan sulit dilaksanakan pada kelompok-kelompok yang memiliki sejarah pahit, misalnya korban penindasan. Pengalaman yang pahit sangat sulit hilang dari struktur kognitif dan sangat sulit pula untuk restrukturisasinya. Contohnya antara lain terjadi di Timor-Timur dan Aceh. Hal senada akan dijumpai juga pada kelompok minoritas di mana ada kekhawatiran bahwa identitas mereka yang selama ini dipertahankan dapat hilang (Hewstone dkk., 2002).

### 2.3. Diferensiasi Mutual

Ada satu model yang menekankan pada aspek kerjasama tanpa mengabaikan kategorisasi yang ada. Model ini merupakan strategi untuk memelihara identitas masing-masing dan hal-hal yang positif dari masing-masing kategori tanpa perlu melakukan rekategorisasi di antara mereka. Agar kelompok-kelompok yang memiliki identitas berbeda tersebut dapat kerjasama secara mutual, maka model kerjasama yang direkomendasikan adalah komplementari. Artinya, bidang-bidang kerjasama yang digarap adalah bidang yang merupakan keunggulan satu kelompok dan diperlukan oleh kelompok lain. Di samping itu, kelompok-kelompok yang terlibat juga harus memiliki tujuan bersama.

Pada kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan, kerjasama mutual dapat dilakukan ketika situasinya memungkinkan. Agar perbandingan antar kelompok dapat diminimalisasi, maka kelompok-kelompok yang ada seharusnya memiliki status yang relatif sama. Secara struktural berarti harus ada kesetaraan ekonomi dan politik bila model ini akan diterapkan. Berbeda dengan dekategorisasi yang mengarahkan kontak ke arah individual, model ini menekankan relasi antar kelompok daripada antar individu. Struktur ini diperlukan karena komplemen yang akan dibangun adalah komplemen antar kelompok, bukan antar individu.

Model ini cukup ideal untuk sinergi kelompok kerja dalam skala kecil dan sedang. Operasionalisasinya akan menjadi rumit dan sulit ketika kelompok menjadi besar seperti suku dan kelompok agama. Tidak berarti bahwa model ini kurang sesuai dalam pengembangan sinergi kebhinnekaan. Salah satu optimalisasi dari model ini berkembang dalam berbagai festival seni dan budaya yang dapat dijadikan sebagai *lesson learned*. Bentuk lain dari model ini juga banyak ditemui pada berbagai delegasi dan *panitia ad hoc* untuk penyelesaian tugas.

Secara sosial psikologis, pada model ini kebhinnekaan masih lebih menonjol dibandingkan dengan keikaannya. Kebhinnekaan cenderung dibiarkan selama keikaan tujuan dan pencapaian dapat diwujudkan. Ada dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bila model ini diterapkan. Pertama adalah bagaimana perbandingan identitas di dalam kelompok yang dibangun dapat diminimalisasi. Menurut Teori Identitas Sosial (lihat Hogg dkk., 2004; Turner & Reynolds, 2003) perbedaan status identitas dapat

menimbulkan bias dan konflik. Kedua, bila tujuan sebagai pengikat pihak-pihak yang terlibat tercapai, bagaimana mendistribusikannya? Bila persoalan pertama dan kedua digabung, berarti ada potensi munculnya deprivasi relatif. Kunci untuk menyelesaikan ini adalah keadilan interaksional dan keadilan distributif (Faturochman, 2002, 2004).

#### **2.4. Identitas Ganda Hirarkhis**

Berbeda dengan rekatgorisasi yang 'menghilangkan' identitas sosial lama atau identitas asal, pendekatan multididentitas menempatkan individu-individu dan kelompok-kelompok untuk memiliki lebih dari satu identitas. Secara operasional identitas ganda yang dimaksud bisa horisontal/sejajar ataupun vertikal. Dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu dipertegas adalah identitas ganda yang vertikal atau hirarkhis. Dengan demikian, identitas kesukuan atau kedaerahan ditempatkan pada level yang lebih rendah dibanding identitas nasional.

Sejauh ini ada kecenderungan bahwa kelompok bercirikan eksklusif dengan satu kategori sosial. Keadaan ini menyulitkan upaya kerjasama, apalagi integrasi. Fenomena kontras *ingroup-outgroup* tampak lebih menonjol. Untuk mengatasinya, dapat dibuat identitas kelompok yang lebih umum, tanpa mengubah identitas kelompok-kelompok yang ada secara total, yang mewadahi semua kelompok. Posisi kelompok umum ini lebih tinggi. Identitas kelompok yang lebih tinggi bersifat inklusif (Brewer & Gaertner, 2003; Hewstone dkk., 2002). Kelompok umum ini akan menjaga kontak antar kelompok agar tidak terjadi gesekan dengan cara menjaga kesetaraan status dalam berinteraksi.

Sisi paling penting dari model ini adalah penghargaan terhadap eksistensi kelompok-kelompok yang sudah ada. Adanya kelompok yang lebih umum dan lebih superior posisinya akan mendorong peningkatan kontak antar kelompok. Ketika hal ini terjadi maka sikap positif terhadap kelompok lain akan tumbuh. Kontak yang terus berkembang di dalam inklusivitas kelompok superior akan mengikat kelompok-kelompok tersebut untuk berasimilasi dan diharapkan prosesnya berlanjut menjadi integrasi (lihat Liebkin, 2003; Padilla & Perez, 2003).

Persoalan yang mengganjal dalam identitas ganda secara hirarkhis ini adalah upaya agar identitas yang lebih tinggi levelnya juga memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan identitas yang lebih rendah. Hal seperti ini tidak perlu terjadi. Identitas nasional dapat dan seharusnya lebih kuat dibanding etnisitas atau kedaerahan tatkala berhubungan dengan pihak luar (bangsa atau negara lain). Di saat seperti inilah diperlukan nasionalisme, konsep yang merepresentasikan diri suatu bangsa dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain (Condor, 2001; Hopkins, 2001; Hopkins & Murdock, 1999; Rothi dkk., 2005; Thomson, 2001). Untuk urusan dalam negeri atau domestik peran daerah dapat lebih besar dan lebih kuat yaitu ketika daerah-daerah lebih mampu, seharusnya memang demikian, dalam mengelola wilayahnya.

Dalam perkembangan bangsa ini pengembangan wawasan Bhinneka Tunggal Ika awalnya sejalan dengan pengembangan konsep identitas ganda hirarkhis dengan semboyan 'kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan'. Sayangnya, sejarah mencatat pula bahwa upaya ini berbelok. Ketika berbagai suku dan daerah sepakat menyatu dan kekuatan pusat menjadi besar, penghormatan pemerintah pusat terhadap

suku dan daerah sangat rendah. Terjadilah kemudian yang kita kenal dengan pemerintahan yang sentralistis dan otoriter seperti di jaman Orde Baru.

## 2.5. Persilangan Kategori

Konsekuensi dari identitas ganda adalah persilangan kategori. Hal ini akan lebih jelas tampak pada identitas ganda horizontal. Pada kenyataannya, persilangan kategori juga merupakan hal yang lumrah dan terjadi pada berbagai kondisi. Salah satu hal yang menarik dari persilangan kategori ini adalah akan ditemukannya banyak titik temu dari kategori-kategori sosial yang ada sehingga potensi konflik dan kerentanan relasi sosial antar individu dan antar kelompok menjadi lebih kecil. Ketika orang memiliki identitas yang banyak berarti dia memiliki dimensi sosial-psikologis yang banyak pula. Bila orang-orang yang seperti ini bertemu maka akan ada persamaan dimensi-dimensi yang dimiliki. Pertemuan dua pihak dalam dimensi tertentu akan memposisikan mereka dalam kategori *ingroup* atau *outgroup*. Dengan demikian persilangan kategori sederhana dapat dikelompokkan menjadi empat seperti tercantum pada Tabel 1. Persilangan *ingroup-ingroup* berarti mereka sama-sama menjadi anggota dalam satu dimensi. Persilangan *outgroup-outgroup* berarti mereka sama-sama *outgroup* di dimensi itu. Persilangan campuran *ingroup-outgroup* atau *outgroup-ingroup* berarti mereka hanya berbagi *ingroup* untuk satu dimensi sedangkan untuk dimensi yang lain menjadi *outgroup* (Crisp dkk., 2001; Crips & Hewstone, 2001; Crisp dkk., 2003; Meiser & Hewstone, 2001; Mullen dkk., 2001).

Tabel 1  
Tipe Persilangan Kategori

		DIMENSI X	
		<i>Ingroup</i>	<i>Outgroup</i>
DIMENSI Y	<i>Ingroup</i>	<i>Ingroup - Ingroup</i>	<i>Outgroup – Ingroup</i>
	<i>Outgroup</i>	<i>Ingroup - Outgroup</i>	<i>Outgroup – Outgroup</i>

Untuk mempermudah pemahaman tentang persilangan kategori dapat menggunakan analogi dua orang yang berkenalan ketika sama-sama akan ke Bali dan duduk berdampingan di dalam pesawat. Adalah hal yang biasa bila pembicaraan mereka menyangkut identitas diri dan sosial. Bila kedua orang tersebut ternyata lahir di Medan dan Alumni SMA 1 Medan maka untuk dua dimensi itu kategori silangnya adalah *ingroup-ingroup*. Bila keduanya ternyata alumni UI tetapi yang satu bekerja sebagai PNS dan yang satu lagi pengusaha maka persilangannya campuran. Bila yang satu penggemar klub sepakbola Chelsea dan benci Manchester United sementara yang satu lagi benci klub



sepakbola Chelsea dan penggemar berat Manchester United maka persilangannya adalah *outgroup-outgroup*.

Persilangan kategori *ingroup-ingroup*, *ingroup-outgroup*, *outgroup-ingroup* berasosiasi dengan dengan inklusivitas (Crisp dkk., 2003). Pada ketiga bentuk persilangan ini ada titik temu dan kesamaan (*share*) dimensi yang akan dinilai positif. Sementara itu, persilangan *outgroup-outgroup* menggambarkan situasi di mana semua kelompok dinilai negatif sehingga bentuknya menjadi eksklusif sosial. Kondisi terakhir ini dinilai paling negatif dalam relasi interpersonal dan antar kelompok pada masyarakat plural. Persilangan *ingroup-ingroup* dinilai paling positif dan persilangan *ingroup-outgroup* maupun *outgroup-ingroup* dinilai cukup positif (Crisp dkk., 2001; Mullen dkk., 2001).

Dilihat dari sisi motivasional ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan rasa persatuan pada persilangan kategori (Brewer & Gaertner, 2003). Pertama, persilangan kategori berarti juga ada 'loyalitas' pada beberapa kelompok. Loyalitas ganda ini akan mereduksi arti pentingnya satu identitas saja, terutama dalam mendefinisikan diri sebagai bagian dari kelompok. Kedua, persilangan kategori akan menyadarkan bahwa *outgroup* juga bisa sebagai *fellow* sehingga sikap-sikap negatif terhadap *outgroup* juga akan berkurang. Ketiga, persilangan kategori akan meningkatkan interaksi interpersonal dan mobilitas lintas batas kelompok. Kondisi seperti ini sangat ideal bagi terbentuknya kebhinnekatunggalikaan.

Dengan pemahaman bahwa pada setiap budaya terkandung nilai-nilai positif dan tidak ada supremasi satu budaya atas budaya lainnya, keragaman budaya seharusnya tidak mengarah pada eksklusif. Kelompok atau suku yang beraneka ragam di Indonesia bila dicermati sungguh-sungguh tentu memiliki banyak titik temu bila dipersilangkan satu dengan lainnya (Abdullah, 2006; Hasan, 2004). Titik temu atau persilangan kategori inilah yang merupakan bagian dari tunggal ika. Oleh karena itu, upaya perumusan persatuan menjadi lebih bijaksana bila dilakukan dengan mencari persamaan-persamaan di antara keanekaragaman, bukan dengan mencari-cari formulasi dari sesuatu yang belum ada seperti pada model dekategoriisasi atau rekategoriisasi.

### **3. Pengembangan Identitas Bangsa**

Keselarasan antara bangsa dan negara dalam bentuk yang homogen sebagai prototipe negara-bangsa (*nation-state*), hanya ditemukan pada sebagian kecil negara di antara negara-negara di dunia ini. Di antaranya adalah Jepang. Sebagian besar lainnya adalah negara dengan heterogenitas di dalamnya, baik dari segi etnis, agama maupun kategori-kategori sosial yang lain. Heterogenitas merupakan ciri yang lebih kental bila ditilik dari sisi domestik-temporalnya dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa membangun identitas bangsa adalah sesuatu yang muskil. Justru perjuangan membangun identitas bangsa pada negara-negara yang plural menjadi bagian penting dan sejajar dengan pembangunan suatu negara. Sementara itu, di negara seperti Jepang yang memiliki homogenitas internal tinggi, identitas bangsa tidak lagi berperan penting untuk memajukan bangsa itu (Sasaki, 2004).

Secara sederhana identitas bangsa dapat dipahami melalui dua mekanisme yang syarat dengan konsep psikologi. Pertama adalah dengan mengembangkan *banal nationalism* (lihat Thompson, 2001) dan kedua melalui *imagined communities* (Anderson, 2001). Sejauh ini pengembangan identitas bangsa ini cenderung terbatas pada perspektif lokal dan berbentuk banal, slogan dan simbolis tetapi kurang jelas, spesifik, dan realistis. Kampanye identitas ini menjadi lebih terasa ke dalam daripada ke luar sehingga kurang dikenal di antara bangsa-bangsa lain dan berasosiasi dengan 'bangsa yang lemah'.

Bangsa, menurut Anderson (2001), adalah komunitas terbayang (*imagined community*) dimana anggota-anggotanya tidak saling tahu dan kenal satu dengan lain, tidak pernah atau sangat jarang saling bertemu, atau mendengarkan satu dengan lainnya secara langsung, tetapi kehidupan bersama mereka eksis pada pikiran. Dengan kata lain, bangsa adalah *intangible*. Meskipun demikian, identitas bangsa dapat dirasakan dan turun menjadi identitas setiap individu anggotanya. Hal yang lebih utama adalah efek positif dari identitas bangsa ini pada harga diri individu. Bangsa yang memiliki prestasi yang membanggakan akan mengangkat harga diri individu anggotanya yang pada akhirnya membawa mereka menjadi pemilik nasionalisme dan patriotisme yang kuat (Arts & Halman, 2006).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, *ASHE-ERIC Higher Education Report* (2003) mengemukakan bahwa identitas memang merupakan konstruksi dan bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Dijelaskan lebih lanjut bahwa munculnya identitas selalu didasari oleh konteks sosial dan kultural yang berkembang, bukan datang dari pihak luar. Identitas yang muncul merepresentasikan negosiasi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Proses negosiasi ini idealnya bukan dalam bentuk marginalisasi salah satu pihak, bukan separasi, tidak cukup sekedar asimilasi, tetapi merupakan integrasi (Liebkin, 2003; Padilla & Perez, 2003). Identitas juga fluid dan dinamik, tidak bisa berupa *illusion of destiny* seperti dikemukakan Sen (2006). Identitas juga muncul sebagai pertanda kebangkitan dari suatu masyarakat atau negara. Satu hal yang sangat menarik ternyata identitas suatu bangsa hampir selalu berbentuk multi identitas.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pengembangan citra bangsa untuk memperoleh identitas positif harus melalui proses yang panjang, historikal, dengan mengembangkan peradaban dan kultur yang kuat serta dibangun dari potensi yang ada. Hal ini telah tercatat dan terbukti dalam beberapa kajian, misalnya di Iran (Ahmadi, 2005), Uzbekistan, Kyrgystan dan Kazakhstan (Alles, 2005), Irlandia Utara (Crisp dkk., 2001), India (Gold, 2003; Sen, 2006), dan Taiwan (Huang dkk., 2004). Secara singkat dapat dikatakan bahwa proses panjang yang dialami negara-negara tersebut dalam membangun identitas tidak serta merta berhasil. Dalam proses itu ada nilai-nilai hidup yang dipegang erat ketika permasalahan menghadangnya.

Pertama adalah berpegang pada komitmen untuk menjaga kebersamaan sebagai bangsa. Di Iran, misalnya, konflik dan pergolakan di dalam negeri tidak sampai memecah bangsa itu dengan berpegang pada tiga pilar identitas utama yaitu warisan sejarah sebagai bangsa Iran, Islam, dan Bahasa Persia (Ahmadi, 2005). Mereka percaya bahwa siapapun yang berkuasa akan tetap menjaga identitas yang telah mendarahdaging dan secara

psikologis terinternalisasi pada setiap warga. Lebih dari itu setiap penguasa di sana selalu berusaha untuk meningkatkan identitas bangsa menjadi lebih positif. Karenanya, negara itu mencatat bahwa selama berabad-abad mengalami pergantian kekuasaan dari berbagai kelompok. Hal serupa terjadi di negara-negara lain meskipun pilar identitasnya berbeda-beda.

Menjaga kebersamaan dan persatuan dalam suatu negara bukan hanya didasarkan pada kepercayaan tetapi juga penghargaan pada pihak lain di negara itu dengan memberi kesempatan berkuasa dan menyumbangkan kemampuannya membangun bangsa. Penghargaan dan kepercayaan antar kelompok di negara ini sebenarnya telah ada, meskipun pada taraf yang tidak sangat tinggi. Dalam sejarah bangsa ini ternyata perseteruan antar kelompok yang mendalam belum pernah ada, baik antar suku maupun antar agama. Persoalan yang muncul lebih banyak sebagai indikasi dari belum matangnya bangsa ini (Boediono, 2007). Untuk mencapai kematangan, pemimpin dan anak bangsa ini perlu menjadi lebih arif.

Apakah ke depan Indonesia akan dapat mengembangkan identitas kebhinnekatunggalikaan dengan baik? Dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang dapat mencapai kemajuan negara dan sekaligus sukses membangun identitas bangsa, harus diakui bahwa Indonesia tertinggal cukup jauh. Salah satu faktor yang diduga memperlambat pencapaian itu adalah apa yang disebut oleh Sasaki (2004) sebagai *depth of cultural traditions*. Saya cenderung tidak setuju dengan kesimpulan itu. Setidaknya ada dua argumen untuk tidak setuju. Pertama, prestasi yang dicapai Singapura dan Malaysia memang di atas Indonesia tetapi kesuksesan itu belum teruji oleh waktu. Kedua, akhir-akhir ini mata dunia justru mulai memfokuskan perhatian pada bangkitnya China, India, dan Iran. Ketiga negara ini justru memiliki *depth of cultural traditions* yang menjadi modal kuat dalam membangun bangsanya (Ahmadi, 2005; Huang dkk., 2004; Sen, 2006). Secara konseptual andalan kemajuan terus bergeser dari pengembangan sumberdaya alam ke sumberdaya manusia ke modal sosial dan ke kearifan budaya. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka inilah kiranya saat yang tepat bagi kita untuk bangkit. Bagaimana agar kita tidak kehilangan momentum ini? Dengan kesimpulan bahwa dekategorisasi dan rekategorisasi bukan merupakan pilihan yang tepat dalam mengembangkan kebhinnekatunggalikaan maka pilihan pengembangan identitas seharusnya juga menekankan pada model hibrida, yaitu identitas ganda hirarkhis dan persilangan kategori. Tentu saja model-model ini harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tidak dibelokkan dan hanya diambil istilahnya tanpa memegang prinsip-prinsipnya.

Heterogenitas budaya di Indonesia pada beberapa tingkatan menuntut kompromi antara satu dengan lainnya. Pada tingkat individu, hal tersebut sudah lebih sering terjadi dalam proses akulturasi pada beberapa kejadian seperti perkawinan antar suku dan migrasi penduduk. Secara konseptual proses tersebut dapat menjadi pembelajaran dari dua sisi, sukses dan gagal (*good and bad practices*). Karena tuntutan berkembang untuk level yang lebih tinggi, pengalaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk merancang ke arah integrasi.

Tantangan yang tidak kalah pentingnya dalam pengembangan identitas bangsa akan datang dari globalisasi. Pada satu sisi globalisasi menguntungkan, pada sisi lain bisa

memperkeruh formulasi kebhinekatunggalikaan kita yang belum mapan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa persoalan identitas bangsa akan hilang begitu saja dengan adanya globalisasi. Hal ini akan terselesaikan bila etnosentrisme dan ingroup favoritisme diganti dengan identitas ganda yang terstruktur. Hal ini telah terlihat pada penelitian Arts & Halman (2005) yang mengkaji identitas bangsa-bangsa Eropa setelah Uni Eropa terbentuk. Salah satu penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat di Eropa merasa bahagia dengan multi identitas yang mereka miliki. Tidak berarti bahwa tidak ada masalah dalam pembentukan multi kebangsaan seperti pada Uni Eropa. Ada jalan panjang untuk mengikis etnosentrisme melalui berbagai konsensus dan regulasi hingga terciptanya tatanan yang cukup adil dan kemampuan mengembangkan kepercayaan di antara mereka melalui proses saling menghargai antar individu, kelompok, dan bangsa di sana.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan agama ini sesungguhnya telah merasakan bahwa satu dengan lainnya ada titik temu (persilangan kategori) dan ada kecocokan satu dengan lainnya (*cultural fit*). Modal ini sangat penting dalam mengembangkan persatuan dan identitas bangsa yang di dalamnya mengandung kebhinnekaan. Diperlukan satu hal penting lagi untuk mengarah ke sana, yaitu akses antar kelompok (Liebkind, 2003; Padilla & Perez, 2003; Voci, 2006). Adalah tugas negara dan menjadi kesadaran bersama bahwa menjadi bangsa yang multi kultur berarti harus siap saling berinteraksi antar budaya.

#### 4. Penutup

Multi identitas adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari di jaman ini. Pemahaman akan multi identitas membantu pemahaman secara menyeluruh tentang bangsa dan warga negara (individu) sekaligus. Salah satu cara untuk memahaminya diformulasikan dalam *ASHE-ERIC Higher Education Report* (2003). Secara ringkas formulasi tersebut dituliskan berikut ini:

Ada beberapa stasiun radio atau televisi yang dapat ditangkap oleh pesawat radio/TV kita. Masing-masing stasiun memiliki program yang menarik dan perhatian kita diharapkan tertuju pada satu di antaranya. Meskipun demikian jarang sekali individu terpaku hanya pada satu stasiun untuk waktu yang lama. Cara yang mudah untuk mendengarkan lagu-lagu yang kita sukai adalah dengan berpindah-pindah stasiun. Namun, menjadi penggemar lagu-lagu tertentu tidak akan membangun identitas kita secara kuat. Pada sisi lain, menjadi pemain instrumen musik akan mengembangkan kemampuan dan sekaligus identitas kita. Bermain musik solo tentu tidak akan lebih menarik bila dibandingkan dengan bermain bersama grup. Seorang pemain musik yang hebat akan mampu bermain bersama kelompok-kelompok yang berbeda. Demikian pula identitas kita. Identitas diri yang kuat dapat menyumbang identitas bangsa yang plural. Agar pluralitas menjadi kuat maka harus dimainkan secara harmonis sebagaimana sebuah orkestra dimainkan.

Hidup dalam masyarakat yang multikultur berpotensi menjadi ciri dari kekuatan internal suatu bangsa (Boediono, 2007). Pergeseran ke arah multikultur secara domestik dan global juga akan berpengaruh terhadap psikologi sebagai disiplin ilmu, terlebih lagi

di Indonesia yang sejak dulu kala memang multikultur. Kebhinekaan seharusnya menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi, sumber pengetahuan, dan sumber kebijaksanaan. Kebinekaan akan membantu menghilangkan Sindrom TINA (*There Is No Alternative Syndrome*), indikasi dari berbagai penyakit psikologis dan sosial. Pada sisi lain, banyak konsep psikologi yang dapat dikembangkan untuk memahami kebhinekaan dan mengembangkan identitas bangsa serta menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang muncul. Secara singkat dapat dikatakan bahwa konsep-konsep yang diperlukan sekarang adalah konsep-konsep psikologi yang bersudut pandang positif, seperti kultur damai (lihat Boulding, 2004), kebijaksanaan (lihat Sternberg, 2004), keadilan (lihat Faturochman, 2002), dan lainnya.

## Referensi

- Abdullah, I. 2006. *Konstruksi dan Rekonstruksi Kebudayaan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Alles, E. 2005. The Chinese-speaking Muslims (Dungans) of Central Asia: A Case of Multiple Identities in a Changing Context. *Asian Ethnicity*, 6(2), 121-134.
- Anderson, B. 2001. *Komunitas-Komunitas Terbayang*. Insist dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmadi, H. 2005. Unity and Diversity: Foundations and Dynamics of National Identity in Iran. *Critique: Critical Middle East Studies*, 14(1), 127-147.
- Arts, W. & Halman, L. 2006. National Identity in Europe Today: What The People Feel and Think. *International Journal of Sociology*, 35(4), 69-93.
- Boediono. 2007. Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 24 Februari 2007.
- Boulding, E. 2004. Peace Culture: The Problem of Managing Human Difference. *Cross Currents*, Winter. Downloaded version <http://infotrac-college.thomsonlearning.com/itw/infomark/336/616/97382319w6/purl=rcl... 11/28/2006>.
- Brewer, M.B. & Gaertner, S.L. 2003. Toward Reduction of Prejudice: Intergroup Contact and Social Categorization. In Brown, R. & Gaertner, S. (eds.). *Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes*. Blackwell Publishing, Oxford.
- Condor, S. 2001. Nations and Nationalisms: Particular Cases and Impossible Myths. *British Journal of Social Psychology*, 40, 177-181.
- Crisp, R.J. & Hewstone, M. 2001. Multiple Categorization and Implicit Intergroup Bias; Differential Category Dominance and the Positive-Negative Asymmetry Effect. *European Journal of Social Psychology*, 31, 45-62.
- Crisp, R.J., Hewstone, M. & Cairns, E. 2001. Multiple Identities in Northern Ireland: Hierarchical Ordering in the Presentation of Group Membership. *British Journal of Social Psychology*, 40, 501-514.

- Crisp, R.J., Hewstone, M., Richard, Z. & Paolini, S. 2003. Inclusiveness and Crossed Categorization: Effect on Co-joined Category Evaluations of In-group and Out-group Primes. *British Journal of Social Psychology*, 42, 25-38.
- Cunningham, G.B. 2006. The Influence of Group Diversity on Intergroup Bias Following Recategorization. *The Journal of Social Psychology*, 146(5), 533-547.
- Effendi, S. dkk. 2003. *Curah Gagasan dari Bulaksumur: Meluruskan Jalan Reformasi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ensari, N. & Miller, N. 2001. Decategorization and the Reduction of Bias in the Crossed Categorization Paradigm. *European Journal of Social Psychology*, 31, 193-216.
- Faturochman. 2002. *Keadilan: Perspektif Psikologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Faturochman. 2004. Konflik, Ketidakadilan, dan Identitas. Dalam Faturochman, Wicaksono, B., Setiadi, dan Latif, S. (eds.). *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Gold, A.G. 2003. Beyond Hindu and Muslim: Multiple Identity in Narratives from Village India. *Journal of American Oriental Society*, 3, 690-692.
- Hasan, F. 2004. Cultural Diversity and the Prospect of Peace Building through Sharing a We-World. Dalam Setiadi, B.N., Supratiknya, A., Lonner, W.J. & Poortinga, Y.H. (eds.). *Ongoing Themes in Psychology and Culture*. The International Association for Cross-Cultural Psychology.
- Hewstone, M., Rubin, M. & Willis, H. 2002. Intergroup Bias. *Annual Review of Psychology*, 53, 575-604.
- Hogg, M.A., Abrams, D., Otten, S. & Hinkle, S. 2004. The Social Identity Perspective: Intergroup Relations, Self-Conception, and Small Groups. *Small Group Research*, 33(3), 246-276.
- Hopkins, N. 2001. National Identity: Pride and Prejudice? *British Journal of Social Psychology*, 40, 183-186.
- Hopkins, N. & Murdock, N. 1999. The Role of the 'Other' in National Identity: Exploring the Context-dependence of the National Ingroup Stereotype. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 9, 321-338.
- Huang, L-L., Liu, J.H. & Chang, M. 2004. The Double Identity of Taiwanese Chinese: A Dilemma of Politics and Culture Rooted in History. *Asian Journal of Social Psychology*, 7, 149-168.
- Liebkind, K. 2003. Acculturation. In Brown, R. & Gaertner, S. (eds.). *Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes*. Blackwell Publishing, Oxford.
- Meiser, T. & Hewstone, M. 2001. Crossed Categorization Effects on the Formation of Illusory Correlations. *European Journal of Social Psychology*, 31, 443-466.

- Mullen, B., Migdal, M.J. & Hewstone, M. 2001. Crossed Categorization Versus Simple Categorization and Intergroup Evaluations: A Meta-Analysis. *European Journal of Social Psychology*, 31, 721-736.
- Padilla, A.M. & Perez, W. 2003. Acculturation, Social Identity, and Social Cognition: A New Perspective. *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 25(1), 35-55.
- Petigrew, T.F. 1998. Intergroup Contact Theory. *Annual Review of Psychology*, 49, 65-85.
- Rothi, D.M., Lyons, E. & Chrysochoou, X. 2005. National Attachment and Patriotism in a European Nation: A British Study. *Political Psychology*, 26(1), 135-155.
- Sasaki, M. 2004. Globalization and National Identity in Japan. *International Journal of Japanese Sociology*, 13, 69-87.
- Sen, A. 2006. *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. Penguin Books, Ltd., London.
- Sternberg, R.J. 2004. What is Wisdom and How Can We Develop It? *ANNALS, AAPPS*, 591, 164-174.
- Stets, J.A. & Harrod, M.M. 2004. Verification Across Multiple Identities: The Role of Status. *Social Psychology Quarterly*, 67(2), 155-171.
- Swann, W.B., Polzer, J.T., Seyle, D.C. & Ko, S.J. 2004. Finding Value in Diversity: Verification of Personal and Social Self-Views in Diverse Groups. *Academy of Management Review*, 29(1), 9-27.
- Thomson, A. 2001. Nations, National Identities and Human Agency: Putting People Back Into Nations. *Sociological Review*, 18-32.
- Turner, J.C. & Reynolds, K.J. 2003. The Social Identity Perspective in Intergroup Relations: Theories, Themes, and Controversies. In Brown, R. & Gaertner, S. (eds.). *Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes*. Blackwell Publishing, Oxford.
- Voci, A. 2006. Relevance of Social Categories, Depersonalization and Group Processes: Two Field Tests of Self-Categorization Theory. *European Journal of Social Psychology*, 36, 73-90.
- Winarto, M.A.Y.T. 2007. Menuju Paradigma Baru Pembangunan Di Indonesia: Peranan Ilmuwan Sosial dan Humaniora. Orasi Ilmiah Academy Professorship Indonesia in Social Sciences and Humanities. Universitas Gadjah Mada, 21 Februari 2007.